



**BUPATIMALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 060/K.180/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

**Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.777/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing OPD.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 28 September 2022

 **BUPATI MALINAU**  
  
**WEMPI W. MAWA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di-Tempat;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di-Tempat;
3. Kepala Bagian Organisasi Setkab. Malinau di-Tempat;
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 060/K.180/2022 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU**

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
<b>MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul</b>	<b>Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Poin</b>	<b>71,94</b>	<b>72,52</b>	<b>72,85</b>	<b>73,18</b>	<b>73,51</b>	<b>73,84</b>	<b>74,17</b>	<b>74,17</b>
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	72,38
	Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	9,40	9,50	9,67	9,97	10,27	10,57	10,57
	Sasaran 3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	ribu rupiah	9.611,00	9.928,00	10.150,00	10.300,00	10.450,00	10.600,00	10.750,00	10.750,00
	<b>Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Ketahanan Nasional</b>	<b>poin</b>	<b>2,65</b>	<b>2,7</b>	<b>2,75</b>	<b>2,78</b>	<b>2,8</b>	<b>2,82</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka kriminalitas	persen	0,69	0,60	0,58	0,55	0,45	0,40	0,35	0,35
		Indeks Resiko Bencana	poin	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
	Sasaran 2. Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	poin	81,36	82,36	83,36	84,36	85,36	86,36	87,36	87,36
	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	78	78,50	79,25	80,6	81,7	82,8	83,3	83,3
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
<b>MISI 2 :</b> Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal	<b>Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah</b>	<b>Pertumbuhan PDRB</b>	persen	<b>-0,62</b>	<b>4,70</b>	<b>5,0</b>	<b>5,28</b>	<b>5,54</b>	<b>5,86</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
		<b>Indeks Gini</b>	poin	<b>0,289</b>	<b>0,287</b>	<b>0,285</b>	<b>0,283</b>	<b>0,282</b>	<b>0,28</b>	<b>0,278</b>	<b>0,278</b>
		<b>Angka Kemiskinan</b>	persen	<b>6,63</b>	<b>7,30</b>	<b>7,00</b>	<b>6,75</b>	<b>6,50</b>	<b>6,25</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
		<b>Laju Inflasi</b>	persen	<b>1,32</b>	<b>0,39</b>	<b>0,36</b>	<b>0,33</b>	<b>0,3</b>	<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
	Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	persen	3,79	4,8	4,82	4,9	4,92	4,95	5	5

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	persen	2,56	2,60	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00	3,00
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	persen	1,82	1,82	1,84	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86
	Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	persen	65	66	70	72	74	75	80	80
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	persen	52,50	55,40	70,60	73,30	76,60	83,30	100	100
	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	poin	70,78	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4
	Sasaran 5. Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,08	4,14	4,14	4,10	4,09	4,05	4,00	4,00
	Sasaran 6. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	90.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94.000.000.000

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	point	N/A	3,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
	Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	persen	49,70	45,10	50,00	52,10	54,80	59,60	64,40	64,40
		Persentase Pemukiman yang Layak	persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
		Rasio Rumah Layak Huni	rasio	1:1,082	1:1,078	1:1,074	1:1,071	1:1,068	1:1,065	1:1,062	1:1,062
		Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	persen	60	60	65	70	75	80	85	85
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	57	62	67	72	77	82	87	87
		Persentase Irigasi Kabupaten yang Berfungsi	persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Sasaran 2. Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi yang membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	persen	95,41	95,41	96,33	97,25	98,17	99,09	100	100
	<b>Tujuan 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>rasio</b>	<b>78,77</b>	<b>78,95</b>	<b>79,03</b>	<b>79,11</b>	<b>79,19</b>	<b>79,27</b>	<b>79,35</b>	<b>79,35</b>
	Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	poin	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
<b>MISI 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan</b>	<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Nilai</b>	<b>52,32</b>	<b>60,50</b>	<b>62,12</b>	<b>64,20</b>	<b>67,51</b>	<b>68,28</b>	<b>71,42</b>	<b>71,42</b>
	Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai	56,32	61,12	64,20	67,10	69,15	72,50	75,25	75,25



Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Kinerja Pemerintah	Nilai LPPD	Nilai	2,8077	2,900	2,930	2,950	2,960	2,980	3,000	3,000
	Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7
	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,28	79,31	81	85	88	88,31	88,50	88,50
	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	persen	8,26	11,93	13,76	15,59	17,74	19,22	21,05	21,05

Malinau, 28 September 2022



BUPATI MALINAU

*(Handwritten Signature)*  
WEMPI W. MAWA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR 060/K.180/2022 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	<i>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</i>	Dinkesdalduk dan KB, BPS	Dinkesdalduk dan KB
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	<i>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan</i>	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	$Y_t = \frac{Y_t}{PPP}$	Bappeda dan Litbang, BPS	Bappeda dan Litbang
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$	Satpol PP	Satpol PP
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	$\text{Risk (R)} = H \times V/C$	BPBD	BPBD

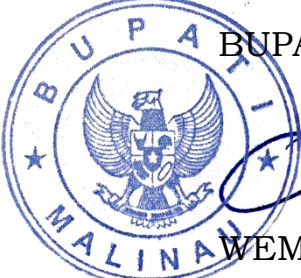
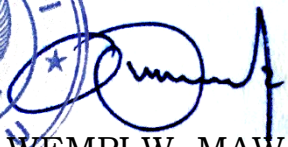
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}} \times 100\%$	DPPPAS	DPPPAS
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	<i>data diambil melalui survei dengan menyebarkan angket kepada pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di desa/kelurahan terpilih</i>	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	$IPK = \text{Jumlah Bobot Dimensi} \times \text{Jumlah Indeks Dimensi}$	Bakesbangpol	Bakesbangpol
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Disbudpar	Disbudpar

9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun } n - \text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun } n} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	$\frac{\text{Jumlah UMK Tahun } n - \text{Jumlah UMK Tahun } n - 1}{\text{Jumlah UMK Tahun } n} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
11	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan, BPS	Dinas Ketenagakerjaan
12	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	<i>Jumlah nilai investasi daerah</i>	DPMPTSP	DPMPTSP
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Persentase Pemukiman Yang Layak	$\frac{\text{Luas pemukiman yang layak}}{\text{luas wilayah pemukiman}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	$\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}}$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim

		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	$\frac{\text{Jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten yang berfungsi}}{\text{luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah desa yang terlayani Telekomunikasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Diskominfo	Diskominfo
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	DLH	DLH
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	$IP = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2 \text{Rata-rata} + (Ct/Lij)^2 \text{Maksimum}}}{2}$		
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	$IKU = 100 - [ 50 / 0.9 \times (Ieu - 0,1) ]$		
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi

		Nilai LPPD	Hasil Evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri	Bagian Tapem
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPK	BPKD
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{PAD}{\text{jumlah pendapatan Daerah}} \times 100$	Bidang Pajak Daerah BPKD	BPKD
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Totalunsuryangterisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Disdukcapil, DLH, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinkesdalduk dan KB, Dishub, DPUPR-Perkim, DPPPAS dan RSUD	Bagian Organisasi
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	$\frac{\text{jumlah desa berkembang yg memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{jumlah desa berkembang (per awal tahun)}} \times 100$	DPMD, BPS	DPMD

Malinau, 28 September 2022


  
 BUPATI MALINAU  
  
 WEMPI W. MAWA